

LAPORAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PENYULUHAN KEBIJAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DI DESA KELAWI KECAMATAN BAKAUHENI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

OLEH :

Dr. MALIK, M.Si

DESEN FISIP
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
2017



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN BAKAUHENI
DESA KELAWI**

Nomor : 352/KL/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Kesediaan Memberikan Pelatihan/Penyuluhan

Kepada Yth : Bapak Dekan Fisip/Univ. Bandar Lampung
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sumaryanto
Jabatan : Kepala Desa Kelawi
Alamat : Desa Kelawi, Kecamatan Bauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen FISIP Universitas Bandar Lampung, untuk memberikan Materi kegiatan pelatihan/penyuluhan tentang Sosialisasi Kebijakan Kebersihan di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan,

Demikian Permohonan ini, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih..

Kelawi, 6 April 2017
Kepala Desa,

SUMARYANTO





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN BAKAUHENI
DESA KELAWI**

SURAT KETERANGAN
No. 37/KL/IV/2017

Yang bertanda tangan di Bawah ini, kepala Desa Kelawi Kecamatan Bakaheni menerangkan bahwa:

N a m a : Dr. Malik, M.Si
Pekerjaan : Dosen FISIP Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. Sukardi Hamdani Gg. Palapa II/LK II Labuhan Ratu

Telah mengadakan Pengabdian/penyuluhan tentang Sosialisasi Kebijakan Kebersihan Dalam Penanggulangan Sampah, di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dimulai pada tanggal 12 s/d 13 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelawi, 13 April 2017

Kepada Desa Kelawi,


SUMARYANTO

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Pengabdian : Sosialisasi Kebijakan Kebersihan Lingkungan Di
Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten
Lampung Selatan.
1. Ketua Pengabdian :
- a. Nama Lengkap : Dr. Malik, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : III/d
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi
Publik
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
 - g. Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi
 - h. Waktu Penelitian : 12s/d13 April 2017
 - i. Jumlah Mahasiswa : 2 Orang
 - j. Jumlah Alumni : 2 Orang
 - k. Staff Pendukung : 1 Orang
2. Lokasi Pengabdian : Desa Kelawi – Kec. Bakauheni
3. Biaya Kegiatan : Rp. 5.000.000.-
4. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 12 April 2017

Mengetahui:

Dekan FISIP


Universitas Bandar Lampung,




Dr. YadiLustiadi, M.Si

NIDN. 0208126201

Ketua ,



Dr. Malik, M.Si

NIDN.09161066002

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Bandar Lampung
Kepala,


Ir. LiliesWidjoko, MT

SURAT TUGAS

Nomor : 035/U/UBL/IV/2017

Sesuai dengan program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung tahun 2017, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, menugaskan kepada :

N a m a : Dr. Malik, M.Si
Jabatan Akademik : Lektor
Pekerjaan : Dosen tetap Fisip Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. Sukardi Hamdani Gg. Palapa II Lk. II Labuhan Ratu.

Untuk mengadakan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni pada tanggal 12 s/d 13 April 2017, dengan judul Sosialisasi Kebijakan Kebersihan Dalam Penanggulangan Sampah.

Demikian Surat Tugas ini agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 April 2017
Dekan FISIP UBL,



Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
1. LATAR BELAKANG	ii
2. LUARAN	ii
3. METODE PENGABDIAN	ii
4. DESKRIPSI PENGABDIAN	ii
5. KESIMPULAN.....	II

ABSTRAK

Judul pengabdian ini adalah Penyuluhan Kebijakan kebersihan Lingkungan di Dasa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Pengabdian ini terutama ingin mensoaliasikan dan menjelaskan hal-hal yang menyangkut implementasi kebijakan kebersihan dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan sampah di Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan dari Pengabdian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui tentang implementasi kebijakan kebersihan dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kebersihan.

Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan telah dilaksanakan kepada aparaturnya Desa dan tokoh, agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda yang ada di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian bahwa ada hubungan yang signifikan antara implementasi kebijakan kebersihan lingkungan dengan efektivitas penanggulangan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, perlu penambahan sarana seperti kendaraan pengangkut sampah, gerobak dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai sesuai kebutuhan, kemudian prasarana seperti Tempat Pembuangan akhir yang (TPA) memadai yang tersedia dalam jangka panjang atau menengah, serta tenaga (SDM) perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Impelementasi, kebersihan, efektivitas.

1. Latar Belakang

Dalam penanganan sampah di Kabupaten Lampung Selatan ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Banyak ditemukan masalah mulai ditingkat sumber produksi sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah, sampai pada pengelolaan dan pemusnahan sampah, sehingga kebijakan ini dikatakan belum diimplementasikan dengan baik.

Dalam menanggulangi dan mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan, pemerintah dan masyarakat telah mengeluarkan dana, misalnya setiap lingkungan dikelola oleh RT/RW dan setiap Kepala Keluarga (KK) mengeluarkan dana kebersihan. Hal ini karena masalah persampahan yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dianggap kurang memadai sehingga masalah persampahan perlu mendapat suplai dana dari masyarakat sebagai wujud dari kesadaran akan kebersihan lingkungan dalam menanggulangi kebersihan itu sendiri.

Dari pengamatan secara empiris yang terjadi di beberapa tempat bahwa permasalahan kebersihan lingkungan perlu ditangani secara serius seperti peristiwa di Jakarta, Bogor, Bekasi, Medan, Cimahi, Bandung dan juga di Kabupaten Lampung Selatan ternyata masalah sampah merupakan masalah bersama sebab banyak Kota/Kabupaten yang tidak memiliki lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar permasalahan sampah tertanggulangi, baik dari pihak pelaksana (Dinas Kebersihan) maupun pihak Pemerintah Daerah.

Sesuai data, perkembangan volume sampah di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2016 dapat dilihat bahwa tahun 2015 volume sampah yaitu 187.990 M3 sedangkan yang dapat terangkut adalah, 145.895 M3 sedangkan sisa yang tidak terangkut adalah 42.095 M3, demikian juga tahun 2016 volume sampah yaitu 211.900 M3 sedangkan yang dapat terangkut adalah, 199.979 M3 sedangkan sisa yang tidak terangkut adalah 11.921 M3, hal ini memungkinkan terjadinya penumpukan sampah karena tidak seimbang antara fasilitas pengangkut sampah dengan volume sampah yang ada. (Dinas Kebersihan Kabupaten Lampung Selatan 2017).

Oleh sebab itu, penulis akan mencoba menganalisis dilihat dari sudut implementasi kebijakan sampai sejauh mana program-program tersebut dalam pengkontribusiannya terhadap efektivitas penanggulangan sampah, yaitu dengan mengadakan Pengabdian dan akan mensosialisasikan tentang Implementasi Kebijakan Kebersihan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan”.

2. Luaran

Pengabdian ini diharapkan sebagai berikut.

- 1) Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kelompok sasaran agar dapat melanjutkan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan tentang kebersihan lingkungan
- 2) Agar kelompok sasaran dapat menerapkan tentang kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Metode Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan metode penyampaian langsung informasi kepada masyarakat sasaran kegiatan, yang diharapkan dapat mengetahui dan memahami pentingnya kebersihan lingkungan

Sasaran dalam pengabdian ini adalah aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang berjumlah 20 orang, yang diharapkan dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat secara bertahap.

4. Deskripsi Pengabdian

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan negara, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini adalah karena terdapat banyak faktor atau kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan negara tersebut. Suatu kebijakan negara dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status-quo pembuat

keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Menurut hierarki proses kebijakan itu, maka kebijakan Pemerintah mengenai pembangunan sarana kebersihan mempunyai landasan hukum, arah kebijakan dan pengaturan teknis. Pada tahap *policy level* Indonesia sebagai negara yang menganut, paham Demokrasi, maka kebijakan tersebut direpresentasikan oleh kemampuan lembaga legislatif dalam membentuk arah dan garis kebijakan.

Dengan demikian diperlukan suatu analisis terhadap kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek tertentu dan memperhatikan indikator yang mempengaruhi atau membangun dan memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhi atau membangun variabel-variabel dalam kebijakan, agar informasi dan pengetahuan yang benar dapat diperoleh, sehingga perhitungannya dapat dilakukan secara benar dan tepat.

Pada kegiatan implementasi kebijakan penanggulangan kebersihan kota penulis anggap masih kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat sebagai sumber sampah yang paling terbesar. Untuk lebih terarahnya dalam menganalisis pengaruh implementasi kebijakan, maka dapat dilakukan melalui suatu pendekatan atau model-model perumusan.

Dalam Pengabdian ini, implementasi kebijakan lingkungan yang dijadikan dimensi adalah didasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III, (2008:9-10) yaitu: (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) kualitas sumber daya manusia, dan (4) struktur birokrasi.

Kemudian dalam efektivitas organisasi terus bertambah, namun hanya terdapat sedikit konsensus tentang bagaimana mengkonseptualisasikan, mengukur, dan menjelaskan efektivitas organisasi. Menurut Ravianto (2009:60) untuk mengukur efektivitas, maka dimensi yang dipergunakan adalah (1) Satuan Waktu; (2) Satuan Hasil; dan (3) Kualitas kerja.

Sesuai dengan sketsa pembahasan tersebut yang mengambil pengabdian di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, implementasi kebijakan kebersihan berpengaruh terhadap efektivitas

penanggulangan sampah di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, maka berdasarkan temuan-temuan analisis kuantitatif (hasil perhitungan statistik) tersebut, peneliti dapat menjelaskan hasil dari Pengabdian sebagai berikut :

Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias, tepat waktu artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Sedangkan relevan berarti bahwa informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.

Komunikasi, yaitu mengingat kemampuan seorang pimpinan terbatas, maka perlu pertimbangan mengenai penyaluran komunikasi dalam suatu bidang, dengan memperhatikan hal tersebut maka suatu kebijakan yang ada maka dibutuhkan penyampaian komunikasi yang baik dan benar serta efektif sehingga penerima dapat melaksanakan suatu informasi dengan baik pula. Prinsip komunikasi berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang pimpinan atau atasan. Pentingnya komunikasi langsung dalam suatu lingkungan kerja dapat mencegah terjadinya kesalahan informasi dalam menjalankan tugasnya, juga bawahan dapat secara langsung memberikan laporan kepada seorang pimpinan tertentu. Indikatornya adalah komunikasi vertikal, komunikasi horisontal.

Untuk mengetahui kualitas waktu penyampaian informasi proses penanggulangan sampah di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, diketahui dari penyuluhan 15 orang pemuka masyarakat terhadap beberapa indikator yang telah ditentukan dalam penyampaian materi. Komunikasi yang dilakukan oleh petugas kebersihan menunjukkan kategori cukup baik, untuk mengoptimalkan makan penulis menyampaikan informasi secara tim.

Dalam pelaksanaan penyuluhan selama ini, belum tersosialisasikan sampai kedesa, sehingga mempersulit pelaksanaannya karena berbagai hal dan cara, yang pokok adalah bahwa pelaksanaan akan gagal karena sifatnya kabur, samar-samar, tidak terinci dengan baik, sarana prioritas, kebijakan kebersihan atau sama sekali

tidak ada. Sifat-sifat ini dapat mengakibatkan longgarnya pegangan dan pedoman bagi pelaksana kebersihan.

Selain itu disposisi dapat diukur dari apakah implementasi tersebut memberikan suatu kepastian hukum bagi pelaksana atau tidak. Kebijakan kebersihan memberikan suatu kepastian hukum kepada pelaksana tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan impemetasi kebersihan lingkungan tersebut.

Keterpaduan antara disposisi tersebut juga turut mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan kebersihan di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten LampungSelatan. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa disposisi kebijakan kebersihan berkualitas cukup baik berdasarkan persepsi 15 orang responden.

Program penyuluhan yang disampaikan terutama dalam meningkatkan pengetahuan, kualitas kemampuan, ketrampilan serta profesionalisme atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat, khususnya di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten LampungSelatan.

Perlunya sosialisasi bagi aparatur Desa dan tokoh masyarakat dari waktu ke waktu semakin dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak, apalagi bila dikaitkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga harus diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi pemerintahan. Hal itu jelas semakin menuntut adanya penguasaan, yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan secara intensif, terencana, terarah dan berkesinambungan, sehingga dalam mengantisipasi dinamika organisasi, para pegawai senantiasa mempunyai kemampuan dan ketrampilan secara memadai untuk melaksanakan segenap tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan demikian pendidikan dan pelatihan menjadikan kualitas sumber daya manusia menjadi tangguh untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.

Keterpaduan kualitas sumber daya manusia tersebut juga turut mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan sampah di

Kabupaten Lampung Selatan. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa kualitas kualitas sumber daya manusia cukup baik berdasarkan persepsi 45 orang responden.

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan sampah di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan akan sulit jika tidak ada dukungan dari pelaksana sendiri. Dukungan ini tergantung dari berbagai hal seperti : kurang informasi, kurang imbalan dsb. Kurang dukungan dapat terlihat dari cara pelaksana menggunakan tugas yaitu melaksanakan kebijakan, cara mereka memanfaatkan kebebasan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan sampah di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dapat diketahui dari :

1) Kemudahan pemahaman

Pemahaman masyarakat dan pelaksana penanggulangan kebersihan ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu dipelajari dan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Berdasarkan hasil Pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman penanggulangan kebersihan di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, termasuk kategori cukup baik. Artinya dari 20 orang aparat desa dan tokoh masyarakat cukup mengetahui bagaimana proses penanggulangan kebersihan.

2) Operasional

Faktor yang turut berperan dalam mendukung penanggulangan kebersihan adalah fasilitas operasional tersebut. Dalam penanggulangan kebersihan fasilitas operasional sangat berperan. Unsur fasilitas (Mobil pengangkut, TPS, dan TPA) sebagai unsur utama dalam pelaksanaan proses penanggulangan kebersihan merupakan unsur yang harus dominan diperhatikan mengingat unsur itulah yang menjadi pelaksana dan obyek dari penanggulangan kebersihan. Kemudian salah satu upaya peningkatan kualitas kualitas sumber daya manusia pada pihak internal organisasi pelaksana kebijakan dapat dilakukan lewat pengembangan pegawai yaitu pendidikan dan latihan, mutasi dan promosi. Untuk unsur obyek kebijakan yaitu masyarakat

yaitu dengan melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap penanggulangan kebersihan agar masyarakat memahami akan kebersihan tersebut.

Dengan demikian bahwa struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam menanggulangi kebersihan, yang tentunya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diperkirakan akan mempengaruhi kegiatan tersebut.

Dari hasil Pengabdian menunjukkan bahwa penanggulangan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai salah satu produk sampah sehingga peran serta masyarakat di dalam usaha penanggulangan limbah Kabupaten perlu lebih ditingkatkan lagi karena walaupun kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh tapi belum cukup tinggi untuk dapat melahirkan tindakan yang nyata dalam usaha swadaya perbaikan lingkungan hidup. Kesadaran yang dimaksudkan dalam pengertian disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri. Masyarakat secara berkelompok membentuk atau menunjuk petugas pengumpul sampah yang dibiayai sendiri oleh masyarakat secara bergotong royong. Partisipasi pada umumnya menjadi mitos pembangunan sehingga hampir semua Negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi merupakan elemen mutlak yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1981 : 222). Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya itu baru berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara.

Mubyarto (1983 : 36) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Dawam Rahardjo (1984 : 94), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat memikul beban dan dalam memetik hasil Pembangunan.

Di dalam proses pengelolaan sampah, yang juga sebagai salah satu bentuk kegiatan pembangunan, peran serta masyarakat sebagai subyek dirasakan sangat

erlu sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas dan pelayanan pemerintah, tetapi berperan aktif dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang ada disekitarnya yang pada akhirnya akan menjamin timbulnya kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Dengan demikian, berdasarkan uraian itu, partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah didefinisikan sebagai keterlibatan dan kesediaan masyarakat dalam memberikan tanggapan positif, memberikan sumbangan berupa tenaga, uang, barang-barang material, dan informasi serta ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Dari hasil Pengabdian lapangan diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya relatif rendah. Melalui pengamatan yang dilakukan secara kontinyu diketahui bahwa masyarakat masih cenderung untuk membuang sampah di sembarang tempat. Khususnya dalam perjalanan (angkutan umum dan pribadi) maupun ditempat-tempat keramaian. Kesadaran untuk membuang sampah ke tempat yang disediakan rendah, terkesan adanya “budaya cuek”. Bila ditanya “mengapa anda membuang sampah sembarangan?” dengan ringan mereka menjawab “biar saja nanti juga ada yang membersihkan untuk apa ada tukang sapu? Mereka kan sudah digaji”. Jawaban yang hampir terkesan sama dengan jawaban tersebut seringkali penulis temukan. Bahkan ada jawaban yang lebih menyedihkan, yaitu “ngapain ngurusin orang lain, urusan aja urusan kamu sendiri”. Tentunya fakta ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah masyarakat telah terjadi menurunnya “budaya malu” dan “budaya bersih”. Peristiwa ini merupakan perwujudan *gunung es* terlihat dipermukaan sedikit, pada kenyataannya yang tidak terlihat jauh lebih besar.

Sedangkan proporsi jawaban responden yang terendah adalah tidak tersedianya alat komunikasi yang baik, menjadi tidak efektifnya pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian bahwa dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini menunjukkan bahwa alat komunikasi yang ada di kantor tidak lagi mendominasi percepatan informasi, apabila ada kebutuhan oleh pegawai sebab alat informasi yang ada pada pegawai dapat dipergunakan untuk memberikan

informasi atau menginformasikan antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya serta antar pegawai.

Secara empirik bahwa pada umumnya petugas kebersihan dalam bekerja belum menunjukkan hasil kerja yang optimal hal tersebut bahwa petugas hanya bekerja seadanya yang penting setiap hari dapat mengangkut sampah, belum bekerja dengan cara bahwa pekerjaan harus tuntas setiap harinya, sehingga masih sering terjadi penumpukan sampah pada lokasi-lokasi tertentu.

Pelayanan Publik (*public service*) dibidang kebersihan sesuai dengan tugas pokok yang dikemukakan oleh Ndraha (1997 : 70) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan (*provider*). Sejalan dengan itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan membentuk Dinas sebagai penyedia pelayanan (*producer*) telah memberikan kewenangan (*authority*) penuh untuk mewujudkan misi dan visi menuju Kabupaten Lampung Selatan yang bersih. Dengan kata lain Dinas Kebersihan adalah satu-satunya Dinas yang mempunyai hak monopoli terhadap pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pemberian hak monopoli ini dimaksudkan agar Dinas Kebersihan dapat membiayai penyelenggaraan kebersihan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pos pendapatan kebersihan.

Dasar pemikiran yang melihat sampah sebagai *collective goods*, maka institusi untuk pengelolaannya pun ada beberapa pilihan sebagaimana yang diutarakan Bromley, antara lain : (1) *Government Service*, (2) *Government Spending*, (3) *Intergovernmental agreement*, (4) *Contract*, (5) *Franchise*, (6) *Grant*, (7) *Voucher*, (8) *Market*, (9) *Voluntary*, (10) *Self Service*.

Penagihan retribusi sampah yang tidak tetap jadinya juga menjadi masalah bagi para konsumen. Terutama bagi keluarga yang pada jam kantor tidak berada di rumah untuk keperluan pekerjaan dan lain-lain. Sementara mereka belum membayar retribusi sampah yang telah disiapkan di perwadhahan tidak akan diangkut oleh petugas kebersihan. Mereka mengharapkan pembayaran retribusi sampah ini agar dibayarkan pada saat mereka membayar rekening lainnya, seperti listrik atau air, sehingga lebih efisien.

Data wawancara diperoleh keterangan bahwa, ketidakpuasan masyarakat yang terakumulasi menyebabkan mereka enggan membayar retribusi, jadi bukan semata-mata konsumen tidak sadar akan kewajibannya. Para pelanggan sering kali kecewa terhadap Dinas Kebersihan karena setiap ada laporan atau pengaduan tentang kebersihan kurang mendapat respon dan tidak ada pelayanan yang cepat. Petugas sering kali lebih mementingkan pengangkutan sampah khusus yang lebih menguntungkan pribadi, seperti pengangkutan sisa bangunan, atau pembersihan air tinja.

6. Kesimpulan

Secara umum bahwa Implementasi kebijakan kebersihan berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan sampah yang selama ini dilaksanakan, namun hal tersebut belum maksimal karena sesuai hasil Pengabdian bahwa fasilitas (Kendaraan, gerobak, TPS) yang dipergunakan sangat minim kemudian TPA juga belum ada yang tersedia dalam jangka panjang atau menengah. Kemudian hasil Pengabdian dikemukakan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan kebersihan telah dilaksanakan namun belum efektif dalam penanggulangan sampah di Desa Kelawi Kec. Bakaoheni Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil Pengabdian menunjukkan bahwa masih adanya anggota masyarakat yang belum mau berubah dalam membuang sampah.
2. Sosialisasi tentang Kebijakan Kebersihan Dalam Penanggulangan Sampah di Desa Kelawi Kec. Bakaoheni Kabupaten Lampung Selatan mempunyai sumbangsih yang cukup besar terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kebersihan di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan sudah ada kemajuan yang signifikan dengan kesadaran masyarakat yang sudah membaik dalam hal kebersihan lingkungan, walaupun belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, 2007., *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia.
- Anhar, Aus Al., 2006., *Klasifikasi dan Penggolongan Jenis Sampah*, Jakarta, Gramedia..
- _____, 2013., *Masalah Sampah Padat di Perkotaan*, Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.
- Azwar, Saifuddin. 2008., (edisi ke 2), *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahar, Yul H. 2000., *Teknologi dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta, Wacana Tama Pramesti.
- Dye, Thomas R. 2008, "*Understanding Public Policy*", (Seven Edition) New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Edward. George III, C. 2008. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Fadillah, Putra, 2001, "*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*", Pustaka Pelajar.
- Hadiwiyoto, Soewedo, 2003., *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta. Yayasan Indayu.
- Rizal (2003), *Efektivitas Keberadaan Organisasi Kelurahan dalam Sistem Pemerintahan Kota Dumai*. Pasacasarjana Unpad.
- Rondinelli, A. Dennis, 2000. *Proyek Pengembangan Sebagai Manajemen Terpadu, Pendekatan Adaptif Terhadap Administrasi Pembangunan*, Terjemahan, Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sa'id E. Gumbira, 2007., *Sampah Masalah Kita Bersama*, Jakarta. PT. Melton Putra.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016, Tentang *Kebersihan Keindahan dan Ketertiban*, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan.

